

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perencanaan merupakan sebuah upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif. Artinya, perubahan yang terjadi pada sebuah ketidakseimbangan awal dapat menyebabkan perubahan pada sistem sosial yang kemudian akan membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan semula. Perencanaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan, salah satu peran perencanaan adalah sebagai arah bagi proses pembangunan untuk berjalan menuju tujuan yang ingin dicapai disamping sebagai tolak ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilakukan.

Menurut Sukirno dalam bukunya menjelaskan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Pembangunan Ekonomi ditandai dengan adanya tingkat pendapatan per kapita yang semakin terus meningkat. Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi yang belum tentu diikuti oleh kenaikan pendapatan perkapita. Adanya pendapatan perkapita merupakan suatu cerminan dari timbulnya perbaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat, di mana pendapatan riilnya meningkat pasti produktivitasnya akan meningkat.

Pemerintahan Indonesia menyadari bahwa pembangunan nasional adalah salah satu upaya untuk menjadi tujuan masyarakat adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut, sebagai kegiatan pembangunan telah diarahkan kepada pembangunan daerah khususnya daerah yang relatif mempunyai kemiskinan yang terus naik dari tahun ke tahun. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan

berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek.

Oleh karena itu, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam menutunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihan sektor inti atau sektor andalan dalam pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin (Simatupang dan Saktyanu,2003:88)

Sadono Sukirno berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal. Untuk memberikan suatu gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara, ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai (Sukirno,2011:423).

Menurut Rakiman (2011:80) Pendapatan perkapita suatu negara merupakan tolak ukur kemajuan dari negara tersebut, apabila pendapatan perkapita suatu negara rendah dapat dipastikan mekanisme ekonomi masyarakat di negara tersebut mengalami penurunan dan begitu pula sebaliknya apabila

pendapatan perkapita suatu negara tinggi maka dapat dipastikan mekanisme ekonomi masyarakat tersebut mengalami peningkatan.

Menurut Sukirno (2005:18) tingkat pertumbuhan ekonomi menggambarkan tentang kenaikan riil dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam suatu tahun tertentu pertumbuhan ekonomi yang berlaku belum tentu, melahirkan pembangunan ekonomi dan meningkatkan dalam kesejahteraan (pendapatan) masyarakat, walaupun terjadi secara berlanjut dalam jangka panjang, hal tersebut disebabkan karena bersamaan dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi selalu rendah dan tidak melebihi tingkat jumlah penduduk, pendapatan rata-rata masyarakat (pendapatan perkapita) akan mengalami penurunan. Apabila dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi sama dengan pertumbuhan penduduk, maka perekonomian negara tersebut tidak mengalami perkembangan dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mengalami kemajuan.

Dalam teori klasik Pembentukan modal dipandang sebagai kunci ke arah kemajuan, karena itu para ekonomi klasik menekankan betapa pentingnya arti tabungan dalam jumlah besar, dan hanya pemilik modal dan tanah merupakan orang yang dianggap mampu untuk menabung, sedangkan kelas pekerja tidak mampu menabung karena mereka hanya menerima upah yang besarnya sama dengan kebutuhan hidup minimal (subsistence).

Sama halnya dengan ekonomi klasik, Schumpeter dan J.M Keynes serta Harrod-Domard, juga menekankan pentingnya pembentukan modal untuk melaksanakan pembangunan. J.M. Keynes, memandang pembentukan modal itu

sebagai suatu tindakan untuk memperbesar pengeluaran masyarakat. Dengan demikian, dengan makin besarnya jumlah pembentukan modal maka akan memperbesar kesanggupan sektor produksi untuk menghasilkan barang-barang yang diperlukan dalam masyarakat.

Sadono Sukirno (2016:121) menyatakan investasi yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Investasi dapat diartikan juga sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Jadi menaikkan laju dan tingkat pendapatan nasional tergantung pada kenaikan laju pembentukan modal. Dan pembentukan modal merupakan kunci utama menuju pertumbuhan ekonomi (Jhingan,2000).

Tabel 1.1

Jumlah Pendapatan Perkapita (Rupiah) Provinsi Jambi tahun 2016-2020

No	Tahun	PDRB ADHK Perkapita	PMTB	PDRB (ADHK)
1	2016	37.729.000	29.039.000.000.000	130.501.000.000.000
2	2017	38.834.000	30.128.000.000.000	136.502.000.000.000
3	2018	40.026.000	30.778.000.000.000	142.902.000.000.000
4	2019	41.148.000	31.894.000.000.000	149.143.000.000.000
5	2020	40.363.000	32.227.000.000.000	148.450.000.000.000
Jumlah		198.100.000	154.066.000.000.000	707.498.000.000.000
Rata-rata		39.620.000	30.813.200.000.000	141.499.600.000.000

Sumber : Badan pusat statistik Provinsi Jambi 2021

Berdasarkan Tabel 1.1 jumlah pendapatan perkapita terjadi fluktuasi tahun 2019-2020 adapun pada tabel 1.1 dapat dituliskan tahun 2016 pendapatan perkapita mengalami penurunan sebanyak Rp 37.729.000, pada tahun 2017 pendapatan perkapita provinsi jambi sebanyak naik menjadi Rp 38.834.000 kemudian pada tahun 2018 pendapatan perkapita sebanyak Rp 40.026.0000, pada tahun 2019 terjadi kenaikan pendapatan perkapita di Provinsi jambi sebanyak menjadi Rp 41.148.000, dan kemudiam terjadi penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp 40.363.000, akan tetapi secara rata-rata selama periode 2016-2020 sebesar Rp. 39.620.000

Berdasarkan tabel 1.1 tingkat PMTB dari tahun 2016 – 2020 cenderung mengalami penigkatan. Di tahun sebanyak Rp 29.039.000.000.000, pada tahun 2017 PMTB Provinsi jambi sebanyak Rp 30.128.000.000.000, pada tahun 2018 PMTB naik menjadi Rp 30.778.000.000.000 kemudian pada tahun 2019 PMTB provinsi jambi mengalami kenaikan menjadi Rp 31.894.000.000.000, kemudian terjadi kenaikan kembali PMTB provinsi jambi pada tahun 2020 menjadi Rp 32.227.000.000.000. Akan tetapai secara rata-rata rata selama periode 2016-2020 sebesar Rp. 30.813.200.000.000.

PMTB Provinsi Jambi Komponen PMTB mempunyai peranan yang sangat penting terkait fungsi investasi sebagai penggerak perekonomian di suatu wilayah karena komponen PMTB dapat digunakan dalam upaya pemerataan ekonomi daerah.

Selanjutnya jumlah PDRB ADHK terjadi fluktuasi tahun 2016-2020 tahun 2016 PDRB ADHK sebanyak Rp 130.501.000.000.000, pada tahun 2017 PDRB

ADHK provinsi jambi naik menjadi Rp. 136.502.000.000.000, kemudian pada tahun 2018 PDRB ADHK sebanyak Rp 142.902.000.000.000, pada tahun 2019 terjadi kenaikan pendapatan perkapita di Provinsi jambi sebanyak Rp 149.143.000.000.000, dan kemudiam terjadi penurunan pada tahun 2020 sebanyak Rp 148.450.000.000.000. Akan tetapai secara rata-rata rata selama periode 2016-2020 sebesar Rp. 141.499.600.000.000. PDRB ADHK mempunyai peranan yang sangat penting terkait fungsi investasi sebagai penggerak perekonomian di Provinsi jambi.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Analisis Pengaruh Tingkat Pendapatan PerKapita, dan Tingkat Pembentukan Modal Terhadap Perekonomian Di Provinsi Jambitahun 2016-2020.**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun pokok permasalahan dalam peneliti ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh tingkat pendapatan perkapita dan tingkat pembentukan modal terhadap perekonomian (PDRB ADHK) di Provinsi Jambi baik secara parsial atau simultan?
2. Berapa besarkah pengaruh tingkat pendapatan perkapita dan tingkat pembentukan modal terhadap perekonomian (PDRB ADHK) di Provinsi Jambi secara parsial dan simultan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakanya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan perkapita dan tingkat pembentukan modal terhadap perekonomian (PDRB ADHK) di Provinsi Jambi baik secara parsial dan simultan.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh tingkat pendapatan perkapita dan tingkat pembentukan modal terhadap perekonomian (PDRB ADHK) di Provinsi Jambi secara parsial dan simultan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori, sehingga menambahkan pengetahuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan data dan informasi serta gambaran mengenai pengaruh tingkat pendapatan perkapita, dan tingkat Pembentukan Modal terhadap perekonomian di Provinsi Jambi.